

BUKU AJAR PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Monica Feronica Bormasa, S.Sos, M.Si.



BUKU AJAR

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MONICA FERONICA BORMASA, S.Sos, M.Si



BUKU AJAR

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis:
MONICA FERONICA BORMASA, S.Sos, M.Si

Editor:
Erik Santoso

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : April 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 18 x 25cm
ISBN 978-634-7148-68-1

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara/Publik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ajar ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pembelajaran Tatap Muka (RPTM) mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat pada umumnya untuk memahami dan memperluas wawasan tentang ilmu administrasi Negara. Dalam penulisan ini penulis telah berusaha menjelaskan secara sederhana konsep dasar ilmu administrasi Negara, sejarah perkembangan administrasi Negara, dan berbagai teori-teori yang berhubungan dengan ilmu administrasi Negara untuk dapat dipahami dengan mudah. Namun penulis sadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu setiap saran yang konstruktif dalam menyempurnakan buku ini akan diterima dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Saumlaki 14 April 2025

Penulis

Monica. F. Bormasa, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK	1
A. PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI	1
B. ADMINISTRASI SEBAGAI SENI DAN ILMU	2
C. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI	6
D. PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI	8
 BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA	 13
A. PERKEMBANGAN ADAMINITRASI NEGARA PADA ZAMAN KUNO	13
B. PERKEMBAGAN ADMINITRASI NEGARA MODERN	17
 BAB III HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ILMU-ILMU YANG LAIN	 19
A. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ILMU SEJARAH	19
B. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ANTROPOLOGI BUDAYA	20
C. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN SOSIOLOGI	20
D. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN PSIKOLOGI	21
E. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ILMU HUKUM	21
F. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ILMU EKONOMI	21
G. HUBUNGAN ADMINISTRASI DENGAN ILMU POLITIK	22
 BAB IV PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK	 25
A. PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK	25
B. PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK OLEH GEORGE FREDERICKSON	26
C. PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK OLEH NICHOLAS HENDRY	31
 BAB V KARAKTERISTIK ADMINISTRASI NEGARA	 35
A. IDENTIFIKASI ADMINISTRASI NEGARA	35
B. KEKHUSUSAN ADMINISTRASI NEGARA	39
C. CIRI – CIRI ADMINISTRASI NEGARA	41

BAB VI PENDEKATAN – PENDEKATAN DALAM ADMINISTRASI NEGARA	44
A. PENDEKATAN TRADISIONAL	46
B. PENDEKATAN PERILAKU	50
C. PENDEKATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	54
D. PENDEKATAN EKOLOGIS	56
E. PENDEKATAN PROSES ADMINISTRASI	57
F. PENDEKATAN EMPIRIS	57
G. PENDEKATAN SISTEM SOSIAL	58
H. PENDEKATAN MATEMATIK	59
 BAB VII PERILAKU ORGANISASI	 61
A. SEJARAH PERILAKU ORGANISASI	61
B. PENGERTIAN ORGANISASI.	63
C. PERUBAHAN PARADIGMA ORGNAISASI	64
D. BENTUK – BENTUK ORGANISASI	64
E. KOORDINASI	65
F. PENGENDALIAN	66
G. PENGERTIAN PERILAKU ORGANISASI.	67
H. PERILAKU INDIVIDU DALAM ORGANISASI	68
I. SIFAT- SIFAT INDIVIDU DALAM ORGANISASI	70
J. PERILAKU KELOMPOK DALAM ORGANISASI	72
 BAB VIII BIROKRASI	 75
A. PENGERTIAN BIROKRASI	75
B. TIPE IDIEAL BIROKRASI	76
C. PERANAN BIROKRASI	77
 BAB IX KEBIJAKAN PUBLIK	 81
A. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	81
B. MODEL KEBIJAKAN PUBLIK	87
C. JENIS – JENIS KEBIJAKAN PUBLIK	89
D. TAHAPAN- TAHAPAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.	90
DAFTAR PUSTAKA	102
BIODATA PENULIS	104

BAB I

KONSEP DASAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK

Deskripsi Singkat

Dalam BAB pertama ini akan dibahas tentang berbagai pengertian dari administrasi, unsur-unsur administrasi Negara dan prinsip-prinsip administrasi Negara, untuk mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan dengan baik.

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dari ilmu administrasi publik dengan baik.

Indikator

1. Pengertian Ilmu Administrasi
2. Administrasi sebagai seni dan ilmu
3. Unsur-unsur Administrasi
4. Prinsip-prinsip Administrasi

A. PENGERTIAN ILMU ADMINISTRASI

Sebelum masuk pada pengertian administrasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu pengertian pengantar. Pengantar secara sederhana diartikan sebagai pembuka menuju sesuatu yang lebih dalam, jadi mata kuliah ini dimaksud sebagai pengantar adalah pengantar menuju suatu keilmuan yang lebih dalam di ranah ilmu administrasi publik

Ilmu (science) menurut prof. Prajudi harus mempunyai objek, terminology yang khas, metodologi yang khas, filosofi yang khas dan teori yang khas. Sedangkan menurut prof Nawawi ilmu harus memiliki objek, metode, sistematika dan mesti bersifat universal.

Sedangkan menurut prof Soerjono Soekanto bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana selalau dapat diperisa dan di telaah (dikontrol) dengan kritis oleh setia orang lain yang mengetahuinya. Perumusan tadi sebetulnya jauh dari sempurna, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa perumusan tersebut telah mencakup beberapa unsur yang pokok. Unsur-unsur (elements) yang merupakan bagian-bagian yang tergabung dalam suatu kebulatan adalah:

- a. Pengetahuan (knowledge)
- b. Terusun secara sistematis
- c. Menggunakan pemikiran
- d. Dapat dikontrol secara kritis oleh oranglain atau umum (objektif)

Sekarang sebenarnya dimana letak ilmu? Ilmu adalah bagian dari pengetahuan sehingga setiap ilmu sudah barang tentu adalah pengetahuan (knowledge) dan sebaliknya setiap pengetahuan belum tentu ilmu.

Secara keseluruhan administrasi diartikan kegiatan membantu dalam mengelola informasi mengelola manusia, mengelola harta benda kearah suatu tujuan yang terhimpun dalam suatu organisasi.

- a) Di Indonesia administrasi dipopulerkan sebagai tata usaha oleh Belanda dan pemerintahan Hindia Belanda yang dalam bahasa belanda adalah *administrate* Dipihak lain karena penduduk pribumi hanya bekerja atau diberi pekerjaan dalam bidang tata usaha.
- b) Tata usaha adalah kegiatan tentang pengurusan surat menyurat, tata buku, penyelenggaraan arsip dan sebagainya yang berupa urusan kantor yang meliputi kegiatan :
 - 1) Korespondensi, rangkaian aktivitas berkenaan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi.
 - 2) Ekspedisi, aktivitas mencatat atau mendata setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ektern.
 - 3) Pengarsipan, proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga dapat dengan mudah ditemukan apabila diperlukan. Informasi yang dimaksud dapat berupa warkat (records) yaitu catatan – catatan tertulis atau bergambar yang memuat suatu keterangan tentang suatu hal atau peristiwa yang digunakan untuk membantu ingatan.
- c) Administrasi dalam arti yang sempit adalah pengawasan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkannya memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain
- d) Administrasi dalam arti yang luas berasal dari bahasa inggris yaitu *administration* yang artinya kerja sama antara kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

B. ADMINISTRASI SEBAGAI SENI DAN ILMU

1. Administrasi Sebagai Seni

Untuk merealisasikan administrasi sebagai seni, dibutuhkan *Art of Administration* oleh seorang administrator agar mereka mampu mengatur persoalan keseluruhannya, membaginya dalam bidang – bidang pekerjaan, menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab terhadap bawahannya sehingga setiap unit dapat melakukan kerja dengan efisien.

Kemampuan administrator dalam mepergunakan seni yang disebut keterampilan admnisitratif yaitu pengalaman kemahiran, kecerdikan, pengalaman, firasat dan penerapan pengetahuan secara sestematis dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seni administrasi bias di dapatkan karena pembawaan kodrat, pendidikan dan latihan serta pengalaman.

2. Administrasi sebagai Ilmu

Ilmu administrasi dikenal dengan sebagai ilmu mulai berkembang pesat pada saat Henry Fayol *administration industrtrielle et general* pada tahun 1916 sehingga dia dianggap sebagai bapak administrasi ilmiah dan manajemen modern.

- 1) Fenomena – fenomena yang menjadi kajian ilmu administrasi adalah: Fenomena kerjasama yang dilakukan oleh dan bersifat publik menjadi pusat kajian administrasi Negara.
- 2) Fenomena kerjasama yang bersifat privat yang menjadi kajian ilmu administrasi niaga.
- 3) Fenomena antar negara serta antar invidu dan organisasi menjadi kajian ilmu administrasi internasional. Paham yang mengatakan administrasi sebagai ilmu adalah jika administrasi dipandang sebagai suatu bidang studi atau lapangan penyelidikan ilmiah.

Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik. Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang berhubungan erat dengan tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Di tingkat atas, yaitu fungsi pengarahan organisasi, terutama berkaitan dengan proses perencanaan jangka panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Di tingkat menengah, yaitu fungsi manajemen organisasi, terutama berkaitan dengan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama, ilim yang diperlukan oleh staf teknis atau profesional yang terlibat dalam proses produksi (hasil). Di tingkat bawah adalah fungsi pengawas. Dalam kontak langsung dengan pekerja-pekerja profesional dan teknis, fungsi pengawasan mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan-kegiatan profesional dan teknis dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketiga tingkatan ini saling berkaitan, memiliki derajat saling hubungan secara positif dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, seperti beragamnya organisasi dari berbagai jensi dan ukuran. Misalnya dalam suatu pabrik atau dalam suatu bagian pelayanan sosial medik, fungsi-fungsi pengarahan, manajemen dan pengawasan dapat tertanam hanya pada satu orang. Walaupun demikian, yang terpenting adalah administrasi didefinsikan sebagai proses

umum yang pengarahan, manajemen, dan pengawasan merupakan unsurunsurnya.

Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung dalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk untuk tujuan yang mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan. Organisasi, dengan struktur formalnya, kelompok-kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar seorang administrator bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Bagi administrator yang menduduki posisi administratif tingkat atas, persoalannya setelah ia memegang posisi itu timbul keengganan untuk meninggalkan peranan spesialisnya, padahal ia di tuntutan oleh posisinya untuk menjalankan peranan organisasional. Dengan demikian, petugas spesialis menjadi tidak efektif sebagai seorang administrator karena ia cenderung memberikan pertimbangan yang sebelumnya memang menjadi bidangnya.

Selanjutnya untuk memudahkan pemahaman, berikut disajikan definisi kerja dari beberapa istilah yang berkaitan dengan administrasi.

1. Administrasi adalah proses yang keseluruhan kegiatan organisasi diarahkan pada pencapaian tujuan antara dan tujuan akhir (*Goals and objective*)
2. Administrator adalah anggota organisasi yang tugas utamanya melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Petugas lembaga publik (walaupun tugasnya dapat meliputi unsur administrasi), bukan administrator dan bukan pula pegawai biasa, tetapi pegawai senior yang merupakan administrator atau pejabat organisasi.

Ilmu administrasi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang paling muda, lahir pada akhir abad ke-19. Henri Fayol (1841-1925), adalah seorang sarjana Prancis, yang pertama melihat adanya prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi administrasi yang mana pun dan dimana pun.

Henri Fayol membawakan pengertian "administrasi (Peradministration) yang umum berlaku di daratan Eropa (Eropa Kontinental), dikalangan bangsa Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda dan sebagainya. Adapun di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris, termasuk Amerika Serikat, pengertian semacam itu tidak ada. Yang mirip-mirip adalah "Manajemen" Oleh karena itu, buka Henri Fayol "*Administration Industrielle at "Industrial and general management"*", suatu terjemahan yang jelas bagi orang Inggris, tetapi membingungkan bagi kita di Indonesia yang menganut pandangan Eropa Kontinental sebagai bekas jajahan Belanda.

Kita di Indonesia tidak boleh berselisih paham satu sama lain hanya karena mempergunakan pengertian-pengertian (Inggris; *Concepts, Belbe-*

grippen) yang berasal dari Bahasa Asing. Dunia dan cara berpikir bangsa-bangsa itu berbeda, apalagi antara Inggris dan Prancis. Antara Inggris dan Amerika Serikat, dunia dan cara berpikir bangsanya berbeda-beda, seperti halnya antara kita dan Malaysia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh sejarah Kebudayaan masing-masing, dan tidak perlu kita bawa ke Indonesia untuk dipertengkarkan oleh kita, sama-sama Sarjana Indonesia.

Oleh karena itu, yang relevan dari pengertian “administrasi” bagi ilmu administrasi, dianggap tidak relevan oleh ilmu ekonomi dan ilmu hukum dan ilmu politik sehingga pandangan terhadap “administrasi” itu berbeda-beda. Keadaan itu terjadi di mana-mana di dunia ini normal karena keperluan itu terjadi di mana-mana di dunia ini normal karena keperluan orang yang selalu berbeda-beda, dan di dalam praktik kehidupan sehari-hari seseorang akan mengambil segala sesuatunya menurut kebutuhan atau keperluan masing-masing. Definisi ilmu administrasi ini bukan merupakan batasan yang tuntas, melainkan merupakan suatu definisi pengantar, definisi kerja, atau “werkdefinitie”.

Setiap ulasan ilmiah ataupun Intelektual harus selalu dimulai dengan batasan atau definisi, rumusan pembatasan yang jelas daripada “objek” atau “kasus posisi” yang hendak dibicarakan atau distudi, atau rumusan pembatasan dari “pengertian”

Baik “objek” maupun “pengertian” tersebut harus merupakan “Ideal-type” (Istilah Max Weber) yang dapat dijadikan “*Model*” bagi yang serupa atau mirip banyak.

Tanda definisi, kita tidak akan mengetahui apakah sebenarnya dan setepatnya yang dipersoalkan, lebih-lebih dalam ilmu sosial. Hal itu karena, segala sesuatu di dunia dan di dalam alam jagad ini, dalam kenyataannya, berhubungan dan berkaitan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga tidak ada satu sesuatu pun di dunia ini yang berdiri sendiri dalam arti murni.

Demikianlah, Ilmu administrasi merupakan (cabang dan disiplin) ilmu pengetahuan yang dipakai oleh para sarjana ilmu administrasi untuk mengkaji dan menstudi “administrasi” sebagai salah satu fenomena masyarakat dan dunia modern, yang dalam abad ke-20 ini sangat menarik perhatian banyak orang. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa “administrasi” itulah yang dapat menolong umat manusia dari efek-efek dan akibat-akibat negatif daripada perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern yang sangat cepat, terlampaui cepat bagi sebagian besar umat manusia dunia, disebabkan oleh terbatasnya fasilitas dan kesempatan pendidikan, terutama di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora (ilmu rohaniah)

C. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI

Dalam proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang. Unsur-unsur tersebut meliputi sebagai berikut.

1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama.
2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Hubungan ini meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pembuatan keputusan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pengoordinasian;
 - e. pengawasan (kontrol);
 - f. penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja.
3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama.
4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
5. Keuangan, yaitu pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan, dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
7. Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.
8. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerja sama.

Di antara ahli administrasi, ada yang mengemukakan unsur-unsur administrasi, yang terdiri atas manajemen, kantor, urusan rumah tangga, urusan pegawai, keuangan, hubungan masyarakat, riset kearsipan, perpustakaan, statistik, hukum, dan ekspedisi (*Dasar-dasar Manajemen* oleh Sukarno K.).

Selanjutnya, untuk membangun suatu administrasi sebagai *sistem* diperlukan berbagai unsur (elements, elementen), baik berupa faktor-faktor situasional dan kondisional maupun sumber daya-sumber daya (*resources*) tertentu.

Adapun unsur-unsur administrasi yang terpenting adalah sebagai berikut.

1. Organisasi
Organisasi diciptakan secara konstitusional oleh pimpinan tertinggi badan usaha, dan menjadi wahana (wadah), struktur, dan rangka dasar (*framework*) administrasi.

2. Lingkungan (*environment*)
Lingkungan yang mengelilingi administrasi yang “berada” di dalam organisasi, terdiri atas berbagai “lapis”: geografis, fisik, biologis (flora, fauna), sosial, budaya, ekonomis, psikologis, politik, teknologis.
3. Administrasi (organisasi) akan bergerak sambil berpindahpindah lapis setiap kali berganti persoalan atau urusan. Sebagian (besar) lingkungan tersebut merupakan lingkungan ekologis.
4. Situasi
Situasi berada di dalam lingkungan dan berada dalam keadaan bergerak serta berubah secara terus-menerus.
Situasi adalah seperangkat faktor lingkungan yang secara langsung dan tidak langsung mempunyai *pengaruh* terhadap peri-keadaan, peri-kehidupan, dan gerak-gerik administrasi (organisasi).
5. Faktor-faktor situasional yang secara langsung menentukan daya-gerak administrasi (organisasi) disebut kondisi.
6. Lokasi
Lokasi adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas semua faktor yang mempunyai relevansi (hubungan kepentingan) dengan administrasi (organisasi) dan mempunyai arti letak dengan diukur menurut jarak transportasi dan komunikasi.
7. Wilayah operasi atau yurisdiksi
Wilayah operasi atau wilayah yurisdiksi adalah bagian dari lingkungan yang dijadikan atau merupakan sasaran-sasaran kaitan atau tindakan administrasi (organisasi).
8. Wilayah operasi ini terdiri atas tiga unsur, yaitu: (a) *wilayah personal*, terdiri atas semua orang dan badan yang mempunyai kepentingan dengan administrasi (organisasi), (b) *wilayah materiil*, terdiri atas semua urusan dan persoalan yang menjadi tugas atau kewajiban administrasi (organisasi),
9. Wilayah teritorial, yakni wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui.
10. Persil (*site*)
Persil terdiri atas tanah halaman dan gedung di tempat kegiatan-kegiatan utama dan pimpinan administrasi (organisasi) berada.
11. Mesin dan peralatan (*equipment*)
Terdiri atas semua barang modal yang merupakan *hardware* daripada administrasi (organisasi).

12. Program usaha (*software*) dan *mission*

Terdiri atas peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur konstitusional, dirakit dengan suatu *filosofi bisnis* dan *filosofi administrasi*, yang merupakan kerangka dan rangka dasar berpikir dan berusaha.

13. Legitimitas

Kekuatan sosial-politik-yuridis yang berasal dari undangundang atau konsesi, lisensi, paten, dan sebagainya.

14. Pimpinan

Pimpinan terdiri atas semua manajer dan *staffer* yang ditanam oleh para pemilik badan usaha untuk bertindak sebagai “kader”, sebagai bingkai penegak filosofi bisnis daripada para pemilik badan usaha.

15. Personal

Personal terdiri atas semua warga organisasi (administrasi) yang secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi daripada administrasi (organisasi).

Masalah pokok administrasi adalah bagaimana secara terusmenerus mengendalikan, merakit, dan memanfaatkan unsur-unsur administrasi di atas secara efektif dan efisien.

D. PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI

Prinsip-prinsip administrasi dikemukakan oleh dua ahli, yakni Henri Fayol (ditinjau secara psikologis), dan Max Weber (ditinjau secara birokrasi). Fayol telah meletakkan 14 prinsip-prinsip umum administrasi dan menjadi dasar pemikiran bagi perkembangan administrasi yakni sebagai berikut.

1. Pembagian kerja (*division of labor/work*)

Prinsip ini sama dengan pembagian tenaga kerja menurut Adam Smith, pembagian kerja atau spesialisasi meningkatkan produktivitas karena memusatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian.

2. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)

Wewenang dan tanggung jawab harus ada dalam pelaksanaan kegiatan. Perlu ada rangsangan untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dan sanksi bagi pelaksanaan kegiatan yang tidak baik.

3. Disiplin (*discipline*)

Disiplin yakni rasa hormat dan taat pada peranan dan tujuan organisasi.

4. Kesatuan perintah (*unity of command*)

Kesatuan perintah atau komando; bawahan hanya menerima perintah dan bertanggung jawab pada satu atasan.

5. Kesatuan arah dan tujuan (*unity of direction*)

Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang manajer menggunakan satu rencana

sehingga tercipta kesatuan arah atau pengarahan. Organisasi akan efektif apabila para anggota bekerja sama berdasarkan tujuan yang sama.

6. Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi (*subordination of individual interest to the general interest*)
Mendahulukan kepentingan umum/organisasi di atas kepentingan pribadi.
7. Penggajian atau upah (*remuneration*)
Pengupahan atau penggajian merupakan pembayaran balas jasa yang harus dilakukan dengan bijaksana, adil, tidak eksploitatif, dan memuaskan pihakpihak terkait.
8. Sentralisasi (*centralization*)
Perlu diatur keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi, yaitu berhubungan pada perbandingan yang mana mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
9. Skala hierarki (*scala chain*)
Merupakan hubungan antar tugas disusun atas dasar suatu hierarki atas bawah.
10. Tata tertib (*order*)
Perlu adanya tata tertib (*order*), aturan, ketertiban dalam organisasi.
11. Keadilan (*equity*)
Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya dengan menerapkan keadilan bagi personalia, persamaan perlakuan dalam organisasi.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*)
Dalam hal ini perlu kelangsungan, keamanan, dan kepastian kerja bagi karyawan, sehingga perputaran yang tinggi merupakan ketidakefisienan.
13. Prakarsa/inisiatif (*initiative*)
Dalam setiap tugas harus dimungkinkan untuk mengadakan prakarsa atau inisiatif.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*)
Solidaritas kelompok kerja akan menggalang persatuan atau kesetiakawanan, kebanggaan bersama, dan rasa memiliki yang tinggi.
Sedangkan prinsip-prinsip administrasi menurut Max Weber (ditinjau secara birokrasi) adalah sebagai berikut.
 1. Adanya Pembagian Kerja
Pembagian kerja berkenaan dengan spesialisasi pekerjaan.
 2. Adanya Hierarki Posisi
Setiap posisi bawahan dikontrol dan diawasi oleh atasan, disebut juga rantai perintah.

3. Aturan Formal dan Regulasi

Mengatur perilaku pekerja secara sama rata, menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja, dan mengurangi ketidakpastian performa kerja.

4. Hubungan yang Impersonal

Tidak ada ikatan emosional antara atasan dan bawahan sehingga menjamin kejelasan posisi.

5. Kompetensi khusus dan latihan merupakan kriteria utama kedudukan administratif

Hal ini berkaitan dengan adanya kriteria seleksi yang ketat dan tidak ada pengangkatan dan pemberhentian secara suka-suka.

6. Memperkerjakan karyawan berdasarkan kompetensi

Pada kenyataannya, biasanya hal tersebut dilakukan saat baru membuka lowongan, apabila kompetensi pekerja yang diterima tidak sesuai dalam bidangnya diberikan pelatihan atau bekal terlebih dahulu agar bisa menunjang ke depannya.

Disamping itu, Herbert A. Simon (dalam Pasolong, 2011:14) membagi 4 prinsip administrasi secara umum, yaitu:

1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hirarki yang pasti.
3. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjabaran prinsip-prinsip administrasi menurut Herbert A. Simon lebih menekankan pada efisiensi dengan diterapkan spesialisasi. Selanjutnya, Luther Gulick dan Lyndall Urwick mengajukan 7 prinsip administrasi yang dikenal dengan singkatan POSDCoRB (*Planning Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*).

1. *Planning*

Penentuan secara garis besar apa yang akan dikerjakan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.

2. *Organizing*

Kegiatan mengorganisir dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan struktur organisasi.

3. *Staffing*

Proses rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan SDM dalam organisasi.

4. *Directing*

Mengarahkan melalui berbagai instrument (peraturan, keputusan, instruksi) sehingga SDM dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari tujuan organisasi.

5. *Coordinating*

Mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai unit yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

6. *Reporting*

Kegiatan pelaporan, menyampaikan apa yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan kepada pihak yang terkait terutama pimpinan organisasi.

7. *Budgeting*

Berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pertanggungjawaban anggaran.

Rangkuman

1. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani), yaitu: *ad* yang berarti intensif; dan *ministrare* yang artinya *to serve* (melayani, membantu, memenuhi). Jadi, administrasi adalah melayani dan membantu secara intensif. Penggunaan istilah administrasi di berbagai negara berbeda, seperti Prancis, Inggris dan Amerika Serikat menggunakan istilah *administration*, Italian menggunakan istilah *amministrazione*, sedangkan di Indonesia sendiri menggunakan istilah administrasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris.
2. Administrasi dalam bahasa Belanda dikenal dengan *administratie* yang memiliki pengertian *stelselmatige verkrijging, en verwerking van gegevens*, yang berarti tata usaha atau administrasi dalam arti sempit (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya); dan *bestuur en beheer*. *Bestuur* adalah manajemen berbagai kegiatan organisasi, sedangkan *beheer* adalah manajemen sumber daya (finansial, personel, materiil, gudang, dan sebagainya). Istilah ini dikenal sejak masuknya Belanda pertama kali ke Indonesia dengan menerapkan *system* administrasi publik klasik yaitu sistem administrasi negara Prancis atau negara Eropa Barat Kontinental. Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut *clerical work, paper work, atau office work*, yang berarti administrasi sebagai ketatausahaan (administrasi dalam arti sempit), yang pada prinsipnya menyangkut seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor baik itu instansi pemerintah maupun instansi lainnya.

3. Organisasi, merupakan unsur utama yang berwujud rangka, struktur atau wadah dimana usaha kerjasama dilakukan, Manajemen merupakan suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam administrasi sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen, selain itu juga keuangan, merupakan segi pembiayaan dalam setiap administrasi. Dari sinilah muncul administrasi keuangan, untuk dapat melaksanakan kegiatan dibutuhkan Perlengkapan, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kebendaaan dan kerumahtanggaan yang selalu ada dalam setiap usaha kerjasama. Kegiatan Pekerjaan kantor/ tata usaha, yang berkaitan dengan pengumpulan, pengiriman, mengelola, menyimpan informasi yang kemudian dikenal dengan administrasi perkantoran, untuk itu juga di butuhkan komunikasi dan hubungan antara masyarakat dan organisasi.
4. prinsip administrasi memang ada dan tetap berlaku, yaitu dengan batasan, prinsip “bekerja” dalam suasana administrasi mana pun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian, hal itu diikuti oleh kebenaran bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana pun juga dengan berhasil. Lebih dari itu, karena administrasi negara telah memberikan sumbangannya yang banyak, jika tidak lebih, terhadap perumusan “prinsip-prinsip administrasi” seperti dilakukan oleh para peneliti dari bidang lain, sehingga para ahli administrasi negara akan memimpin kalangan akademisi dalam menerapkan prinsip-prinsip administrasi negara ke dalam “dunia nyata” organisasi, masyarakat atau sebaliknya

Soal-soal Latihan

1. Jelaskan pengertian administrasi secara luas dan sempit.
2. Jelaskan megapa administrasi di sebut sebagaiilmu dan seni
3. Sebutkan dan Jelaskan unsur-unsur administrasi
4. Jelskan prinsip-prinsip Administrasi

BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA

Deskripsi Singkat

Dalam BAB ini kita akan membahas sekilas dari sejarah perkembangan administrasi negara pada zaman kuno dan pada perkembangan administrasi negara pada zaman modern untuk itu diharapkan agar mahasiswa dapat mengikuti materi ini dengan baik.

Kompetensi Dasar

Setelah Memepelajari dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan adaministrasi negara ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dengan tepat sejarah perkembangan administrasi negara dari zaman kuno hingga ke zaman modern.

Indikator

1. Perkembangan Adaminitrasi Negara Pada Zaman Kuno
2. Perkembangan Administrasi Negara Modern

A. PERKEMBANGAN ADAMINITRASI NEGARA PADA ZAMAN KUNO

Sejarah perekembangan administrasi Negara dalam kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari faktor sejarahnya, karena apa yang telah dicapai oleh administrasi negara saat ini, adalah bentuk perjalanan sejarah yang panjang dari gejala administrasi negara sebagai gejala sosial yang bersifat *universal*, administrasi negara hadir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, dapat diketahui bahwa sejarah tidak dapt terulang kembali, namun sejarah dapat dipelajari untuk diketahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lampau.

Perkembangan administrasi Negara pada zaman kuno diterapkan dalam beberapa negara yaitu:

1. Mesir Kuno

Berdasarkan penelitian sejarah bahwa Mesir dikatakan negara yang paling tua yang memiliki administrasi birokrasi,. Administrasi negara di mesir diperkirakan telah berlangsung sejak tahun 1300 SM, yang mana masyarakat Mesir telah mengenal adanya system administrasi sekalipun hanya sebagian kecil yang ditemukan pada dinding Mesir diantaranya yaitu seperti apa yang dititahkan oleh “Ramses III” adalah “Demi Tuhan aku telah buat dekrit besar mengenai administrasi kuil-mu, dan sebagai pengunci titahnya dikatakan bahwa “Aku perlakukan para budak belian sebagai penjaga dari administrasi terusan dan penjaga dari lading-ladang gandum, demi engkau Tuhan Re”. Seperti apa yang dikatakan oleh *Max Weber* bahwa mesir adalah negara yang paling tua yang

memiliki administrasi birokrasi modern, walaupun kala itu berkisar masalah pengairan dengan pemanfaatan aliran sungai nil, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dibidang pertanian yang bertumpu pada sistem ekonomi swasembada.

Menurut *Michael Rostovtzeff* yang selama bertahun-tahun membahas mesir mengatakan bahwa pada jaman Fir'aun, organisasi dan ekonomi yang tegas benar-benar khas jika dibandingkan dengan bangsa lainnya, hal ini dapat dilihat pada dinasti keempat, kesebelas dan kedelapan belas. Yang menegaskan adanya keorganisasian yang ketat terhadap usaha ekonomi dari seluruh penduduk untuk menjamin setiap warga masyarakat secara keseluruhan memperoleh kemungkinan yang amat terbuka guna mengejar tingkat kemakmuran. Disisi lain Ptolemius menganggap sebagai miliknya sendiri ia menganggap dengan cara seperti inilah mesir dapat diperintah. Akibatnya sistem kepegawaian dan administrasi Mesir kuno disempurnakan, disistematiskan serta dikonsentrasikan ke tangan-tangan penguasa baru dalam membantu birokrasinya. Dari apa yang berlaku di Mesir kuno telah dirasakan pentingnya seni dalam penyusunan dan perencanaan program.

2. Cina Kuno

Dalam prakteknya administrasi negara di Cina sangat dipengaruhi dan diberi semangat oleh doktrin "*Confusius*" yang salah satu diantaranya menyatakan bahwa perlunya penyelenggara rumah tangga pemerintahan yang baik serta perlunya melakukan seleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur. Apabila kita membahas mengenai ajaran dari Confisius, kebanyakan yang ditampilkan adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan masalah kode etik, yang mana masalah pemerintahan sebenarnya merupakan pusat dari filosofis Confusius dan merupakan titik sentral dari budaya Cina Kuno. Dari beberapa karya dari Confusius yang paling berharga adalah minatnya metode-metode yang jaman sekarang dikenal dengan istilah administrasi dan manajemen. Misalnya "Micius" atau "Mo-ti", yang ditulis pada tahun 500 SM dianggap sebagai pedoman bagi pemerintahan dan administrasi di Cina yang tetap dipatuhi selama kurang lebih enam ratus tahun.

Pedoman ini terkenal dengan nama "*konstitusi Chow*". yang mengandung aturan bagi perdana Mentri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Adapun yang paling menonjol pada masa Cina kuno adalah keberhasilannya menciptakan sistem administrasi kepegawaian yang baik sehingga banyak prinsip administrasi kepegawaian modern yang meminjam dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian Cina kuno, seperti istilah "*merit system*".

3. Yunani Kuno

Di kalangan bangsa Yunani kuno juga ditemukan berlakunya sistem administrasi. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi publik sangat menonjol dalam alam pikiran orang-orang Yunani kuno. Bukti-bukti historis yang tertulis menunjukkan bahwa kebanyakan sarjana dan pemimpin Yunani, seperti Aristoteles, sangat sibuk dalam menerangkan dan mengenalkan bentuk pemerintahan yang didukung rakyat serta konsepsi demokrasi. Bentuk administrasi Yunani dengan tepat dicerminkan dalam pidato pemakaman yang disampaikan Pericles untuk menghormati mereka yang gugur sebagai pahlawan dalam perang Peloponnesia (430 SM).

"Pemerintah kita", ucap Pericles, "adalah sebuah pemerintahan demokratis, karena administrasinya berada di tangan orang banyak, bukan dalam tangan segelintir orang".

Di samping Pericles terukir dalam sejarah nama-nama besar seperti Socrates dan Plato, dua tokoh yang paling bersemangat dalam mengkaji hubungan antara negara dan masyarakat. Bahkan Socrates telah mendiskusikan peranan manajer dalam temu wicaranya dengan Nicomachides.

4. Romawi Kuno

Berbeda dengan di Yunani di Romawi administrasi negara dipandang lebih realistis serta lebih mempunyai warna metodologis. Walaupun demikian antara administrasi negara di Roma dengan di Yunani banyak memiliki kesamaan, walaupun bangsa Romawi tidak begitu merinci mengenai administrasi negeranya, namun hal tersebut tidak mengecilkan kenyataan bahwa administrasi negara juga berkembang di Romawi. Salah seorang tokoh yang terkenal yaitu *Marcus Tullius Cicero* seorang ahli hukum dan negarawan pada masa pemerintahan kaisar Julius Caesar dan *Aurelius Casiodorus* seorang senator dan penasihat raja. Hal yang menarik dari Cicero adalah seperti apa yang dituangkan dalam *De Officiis*, yakni "Mereka yang telah dianugrahi kemampuan untuk mengadministrasikan urusan-urusan publik seharusnya menepikan rasa kebencian, dan sebagai gantinya senantiasa memberikan arahan dalam kegiatan pemerintahan. Bagi mereka yang berminat untuk melibatkan diri dengan urusan-urusan publik senantiasa memperhatikan petunjuk Plato yakni: pertama yaitu mengembangkan orientasi apa yang terbaik bagi rakyat dengan cara mengendapkan kepentingan pribadi. Kedua, senantiasa menjamin kemakmuran keseluruhan lembaga politik dan tidak hanya melayani kepentingan satu partai dengan merugikan pihak lain

5. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan gereja memegang peranan yang cukup besar, karena gereja-gereja pada waktu itu ikut mewarnai upaya untuk mengembangkan sistem administrasi. Disamping itu juga masyarakat gerejani

dapat memainkan peranan yang cukup efektif, jika tersusun dalam suatu struktur institusional. Menurut Calvin, memandang perlunya gereja memiliki kepemimpinan yang kuat dan berdaya guna. Calvin menyodorkan pemikiran mengenai bangun administrasi dimana perumusan kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan, sedang pengesahan atau penolakan dilakukan oleh pemeluknya.

6. Prusia – Austria

Pada jaman dikenal dengan periode kameralis yakni sekelompok profesor dan ahli administrasi negara Jerman dan Austria yang berjaya pada kurun waktu 1550 – 1700-an. Periode Kameralis terjadi pada masa pemerintahan William I dari Prusia (1713 – 1740) dan Maria Theresia dari Austria (1740 – 1780). Pada umumnya kaum kameralis diidentikan dengan kaum markantelis di Inggris dan kaum fisiokrat di Perancis. Dimana pada masa itu lebih memusatkan perhatiannya pada kekuatan fisik negara, disamping itu juga memberikan perhatian yang cukup besar dibidang ekonomi serta mengadakan pembaharuan mengenai masalah perpajakan. Adapun tokoh yang terkenal yaitu *Melchior Von Osse* dan *Georg Zincke*, yang mana mereka banyak melaksanakan program latihan bagi para administrator. Yang mana semua itu tiada lain ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan publik.

7. Amerika Serikat

Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat sebelum tahun 1776 merupakan koloni Inggris, sehingga kebijaksanaan yang berlaku sangat tergantung dari kebijaksanaan dari Inggris, yang justru menyebabkan banyak ketimpangan yang terjadi karena perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan berbagai problema, karena kebijaksanaan yang dianggap baik yang diterapkan oleh negara induknya belum tentu cocok untuk diterapkan di daerah koloni yang pada akhirnya akan mempengaruhi terjadinya pemisahan negara tersebut dari induknya. Setelah mencapai kemerdekaannya Amerika Serikat dihadapkan pada tugas untuk menentukan dan menyusun sistem administrasi dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Namun sayangnya Undang-Undang konfederasinya secara fungsional hanya mempunyai dampak kecil dalam memperbaiki sistem administrasi Amerika Serikat.

Pada tahun 1813 *Alexis de Tocqueville*, seorang pengamat politik menerangkan bagaimana administrasi diselenggarakan di Amerika, yang mana beliau telah mempelajari sistem administrasi dalam konteks demokrasi. Dan sebagai hasil dari pengamatannya mengungkapkan bahwa para administrator disana belum mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang administrasi. Oleh karena itu pada awal berdirinya negara Amerika tampak adanya keprihatinan yang umum berkaitan dengan aspek administrasi negara. Karena jumlah penduduk semakin lama semakin bertambah seiring dengan penambahan unit-

unit pemerintahan yang baru, sehingga masalah penyelenggaraan negara semakin kompleks. Adalah *Thomas Jefferson*, dengan gagasan-gagasan agrarisnya dan falsafahnya tentang pemerintahan dan sentralisasi administrasi serta pandangannya mengenai hubungan negara bagian dengan pemerintahan nasional yang memelopori pendekatan Amerika terhadap administrasi negara. Disamping itu juga paham dari *Jackson* pada tahun 1800-an juga besar pengaruhnya terhadap sikap administrasi pemerintahan, terutama mengenai masalah penempatan orang dalam jabatan-jabatan publik, yang terkenal dengan *patronage system*, yaitu suatu sistem yang meletakkan orang-orang dari pertain politik dalam jabatan-jabatan administrasi pemerintahan. Sistem ini sangat mewarnai administrasi AS pada waktu itu. Menurut *Waldo*, menyatakan bahwa filsafat demokrasi dari Jefferson – Jackson cenderung mendorong untuk mencurigai peranan pemerintah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwasanya pemerintah tidak boleh terlalu banyak mencampuri urusan perseorangan, tetapi sebaliknya pemerintah harus memberikan peranan yang besar pada perorangan dalam menentukan kegiatan kolektifnya.

Sejak revolusi Amerika ada tiga perubahan pokok yang mempengaruhi administrasi negaranya, yaitu

1. Terdapatnya dua sistem kepartaian
2. invasi yang luas yang oleh partai-partai politik terhadap urusan-urusan administrasi pemerintahan
3. Terdapatnya usaha untuk menggalakkan spesialisasi, diversifikasi dan profesionalisasi di semua jabatan.

Tiga perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai karakteristik yang mewarnai administrasi negara AS sampai sekarang.

B. PERKEMBANGAN ADMINITRASI NEGARA MODERN

Administrasi negara memasuki lingkungan modern sejak Woodrow Wilson menyuarakan Administrasi negara sebagai Studi ilmiah lewat tulisanya *The Study Of Administration* pada tahun 1887, Wilson berusaha memisahkan administrasi negara dengan ilmu politik, Wilson mendesak agar ilmu politik lebih berkonsentrasi pada bagaimana urusan pemerintahan itu. Selanjutnya Wilson juga menginginkan ilmu administrasi negara tidak hanya fokus pada masalah personalia, tetapi juga terhadap organisasi dan manajemennya.

Rangkuman.

1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa terdapat tali sejarah yang merakit perkembangan administrasi publik. Apa yang dicapai dan diberikan oleh administrasi publik sekarang, tidak lepas dari upaya-upaya yang tidak kenal lelah yang telah dilakukan oleh para peletak

dasar dan pembentuk administrasi yang dahulu. Administrasi modern penuh dengan usaha untuk lebih menekan jabatan publik agar mempersempit segala kegiatannya untuk mewujudkan kemakmuran dan melayani kepentingan umum.

2. Dalam sejarah perkembangan administrasi pada zaman kuno ada terdapat beberapa proses perkembangan sejarah administrasi pada beberapa Negara yakni Mesir Kuno, Cina Kuno, Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, Prusia-Austria, dan Amerika Serikat, dimana pada setiap Negara ini telah terlihat sistem administrasi yang diterapkan pada egaranya masing-masing
3. Dengan kata lain, administrasi memasuki lingkungan modern sejak Woodrow Wilson menyuarakan administrasi publik sebagai studi ilmiah melalui tulisannya "The Study of Administration" (1887). Wilson berusaha untuk melepaskan (memisahkan) administrasi publik dari ilmu politik. Ia mendesak ilmu politik agar lebih berkonsentrasi pada bagaimana pemerintahan diurus. Ini tersirat dari ucapannya bahwa: "It is getting to be harder to run a constitution than to frame one."

Soal – Soal Latihan

1. Jelaskan bentuk implementasi sistem administrasi Negara yang diterapkan pada masa kuno saat itu.
2. Mengapa Mesir dikatakan memiliki administrasi birokrasi yang tertua di dunia.
3. Dari uraian tersebut diatas adakah sesuatu yang masih relevan untuk situasi dimasa sekarang.
4. Apa yang menjadi pusat perhatian Confusius mengenai administrasi negara.
5. Jelaskan perkembangan administrasi pada zaman modern.